



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CILEGON

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DANA SUJAKSANI

2. Jabatan : ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM

3. NHK : 167569

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.037.750.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/273 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.482.500.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/45 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 499.500.000

3. Tanah Seluas 1113 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 55.750.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 300.000.000

 MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300,000,000

| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | | | Rp. | 10.000.000 |
|-------------------------------|-------|-------|-----|------------------------------|
| D. SURAT BERHARGA | N. | N. | Rp. | - J |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Kar | Kar | Rp. | 621.866. <mark>7</mark> 86 |
| F. HARTA LAINNYA | | | Rp. | |
| Sub Total | KPK | KPIK | Rp. | 2.969.616. <mark>7</mark> 86 |
| HUTANG | | | Rp. | 147.061.603 |
| TOTAL HAPTA KEKAYAAN (II-III) | all . | all . | Pn | 2 822 555 183 |

Catatan:

III.

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-





Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

